

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP BIAYA AUDIT

by 270. 1848. Fitri Nurjanah1 Erina Sudaryati1 270. 1848. Fitri Nurjanah1
Erina Sudaryati1

Submission date: 18-Sep-2019 03:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1175015412

File name: 270._1848-5203-1-SM_artikel_masuk.doc (187.5K)

Word count: 4108

Character count: 25901

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP BIAYA AUDIT

Fitri Nurjanah¹
Erina Sudaryati^{1*}

*Correspondence

Email: fitrinurjanah129@gmail.com

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRAK

The purpose of this study is to analyze the effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee. This research uses samples of Non-financial companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. The sampling technique used purposive sampling. The total number of companies used as research samples is 444 companies. Using tools SPSS 20 and testing hypothesis using linear regression with a significance level of 5%. The F test indicates a stable and significant model. R square is 38.4% indicating there are other variables that can affect the model by 61.6%. The result show political connection can positively significant effect on audit fee and effectiveness of audit committee positively significant on audit fee because audit committee wants a higher audit quality from the auditor.

Keyword: *political connection, effectiveness of audit committee, and audit fee*

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal sangat pesat dan persaingan usaha semakin pesat di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal di Indonesia sudah menjadi salah satu dari tujuan investasi bagi investor luar dan dalam negeri. Peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia (BEI) harus melaporkan laporan tahunannya yang telah di audit kepada OJK. Laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, debitur, manajemen, dan pemerintah (Arnold dkk., 2012). Laporan keuangan yang digunakan sebagai sumber informasi dan pertanggungjawaban kepada shareholder dan stakeholder harus melalui proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Lestari 2015).

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal dapat mengurangi konflik antara principal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengurangi konflik kepentingan prinsipal melakukan pemantauan untuk memantau kinerja agen dengan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Prosedur pemantauan dapat meningkatkan biaya agensi (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya agensi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk melakukan prosedur audit terhadap perusahaan (Francis dan Wilson, 1988).

Auditor eksternal dalam menjalankan prosedur audit, harus mengukur risiko dari perusahaan atau klien yang akan di audit (Ghosh dan Tang, 2015). Penilaian risiko adalah

analisis yang dilakukan oleh auditor tentang risiko yang relevan terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan (Arens dkk., 2014). Semakin tinggi risiko audit yang dinilai oleh auditor, semakin tinggi upaya audit yang diperlukan untuk menghasilkan opini audit yang sesuai (Bedard dan Johnstone, 2004). Oleh karena itu, risiko audit dapat menentukan berapa besar biaya yang harus dibayar oleh perusahaan diukur dengan besar upaya yang dilakukan auditor dalam melakukan prosedur audit. Risiko inheren merupakan salah satu risiko yang dinilai oleh auditor sebelum melakukan proses audit (Arens dkk., 2014).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik terkait dengan risiko inheren yang tinggi (Gul, 2006). Risiko inheren adalah resiko atas kerentanan asersi salah saji yang material (Arens dkk., 2014). Selain terkait dengan risiko inheren, perusahaan yang memiliki koneksi politik juga terkait dengan tingkat transparansi yang rendah dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan dan terjadi risiko salah saji pada laporan keuangan (Chaney dkk., 2011; Srinidh dkk., 2011; Walker dan Reid, 2002; Yu dan Yu, 2011). Semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi juga upaya yang dilakukan auditor dalam memeriksa perusahaan yang terkoneksi secara politik. Auditor diharapkan dapat memberikan opini yang tepat pada laporan keuangan dengan imbalan biaya audit yang lebih tinggi dari perusahaan yang terkoneksi (Ariningrum dan Diyanty, 2017; Gul, 2006; Khan dkk., 2016; Tee, 2018; Wahab dkk., 2011; Wahab dkk., 2009).

Selain koneksi politik dalam perusahaan, ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi biaya audit yakni tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat dikatakan baik apabila memenuhi standart yang diterapkan pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Tata kelola perusahaan berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dengan membentuk komite di bawah mereka, salah satunya adalah Komite Audit.

Beberapa hasil penelitian efektivitas komite audit terhadap biaya audit. Penelitian yang dilakukan (Ghanem dkk, 2016; Collier dan Gregory, 2006) bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif biaya audit dikarenakan dengan keberadaan komite audit yang efektif pada suatu perusahaan dianggap dapat menyediakan sistem pengawasan yang lebih objektif. Sistem pemantauan yang efektif akan menghasilkan permintaan untuk kualitas audit yang lebih baik. Ini nantinya akan memiliki implikasi untuk biaya audit yang lebih besar (Hay et al, 2006).

Kebijakan penentuan biaya audit sudah diatur dalam peraturan IAPI nomor 2 tahun 2016 hanya menyebutkan bahwa besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan professional lainnya. IAPI melaporkan pada tahun 2016 bahwa penerapan mekanisme regulasi tidak optimal sampai saat ini. Akuntan publik bersertifikat masih banyak yang tidak mengungkapkan bagaimana cara mereka menentukan jumlah biaya audit yang akan diterima. Mengingat aturan ini belum diterapkan secara efektif di Indonesia, maka faktor penentuan biaya audit di Indonesia masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dari faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi biaya audit yaitu adanya hubungan politik pada suatu perusahaan dan efektivitas Komite Audit.

Perumusan Hipotesis

Li dkk. (2008) mengungkapkan bahwa dengan adanya koneksi politik dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut, melalui kebijakan yang berpihak pada perusahaan dan kemudahan dalam mendapatkan proyek pemerintah. Untuk

mendapatkan keuntungan, perusahaan melakukan lobi untuk membuat kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan di mana kegiatan ini membutuhkan dana atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Fisman, 2001; Johnson dan Mitton, 2003). Sumber daya yang disediakan dalam bentuk sumbangan kepada pihak terkait untuk membuat kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan dapat menimbulkan risiko terkait dengan eksploitasi dan manipulasi sumber daya perusahaan karena sumbangan itu sendiri tidak selalu melalui persetujuan dari pemegang saham minoritas yang memicu terjadinya masalah agensi (Ramsay dkk., 2001). Oleh karena itu, keberadaan koneksi politik dalam perusahaan sering dikaitkan dengan tingkat transparansi yang rendah dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan dan terjadi risiko salah saji pada laporan keuangan (Chaney dkk., 2011; Srinidh dkk., 2011; Walker dan Reid, 2002; Yu dan Yu, 2011).

Perusahaan yang memiliki risiko yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar dapat terjadi salah saji material terjadi dalam laporan keuangan (Gul, 2006). Dengan peningkatan penilaian auditor tentang risiko dalam perusahaan termasuk risiko inheren, semakin tinggi upaya audit yang diperlukan oleh auditor untuk mengaudit perusahaan. Selain itu, upaya yang lebih besar menyebabkan auditor merasa bahwa mereka perlu membebaskan sejumlah besar biaya audit kepada perusahaan (Gul, 2006). Oleh karena itu, perusahaan yang terhubung secara politis dipercaya untuk membayar biaya audit lebih besar daripada perusahaan yang tidak terhubung secara politis (Ariningrum dan Diyanty, 2017; Gul, 2006; Khan dkk., 2016; Tee, 2018; Wahab dkk., 2011; Wahab dkk., 2009).

H1: koneksi politik dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit

Indonesia menerapkan system *two tier* dalam tata kelola perusahaan. Organ tertinggi perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan yakni dewan komisaris, untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan dewan komisaris membentuk komite audit, komite audit dalam membantu melakukan pengawasan. Sehubungan dengan biaya audit, ada dua argumen yang menggambarkan pengaruh efektivitas Komite Audit terhadap biaya audit.

Argument pertama dalam sisi penawaran yang dilihat melalui perspektif auditor. Komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Auditor percaya bahwa resiko inheren dapat lebih rendah apabila komite audit dalam perusahaan efektif menjalankan tugasnya, pada akhirnya kan mengurangi biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan (Wahab et al, 2011). Pada sisi permintaan permintaan yang dijelaskan oleh Hey dkk. (2006) biaya audit yang dibayar oleh perusahaan ditentukan oleh perusahaan sebagai pengguna. Efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh Komite Audit. Perusahaan meminta kualitas layanan audit yang lebih tinggi dan meminta prosedur audit lebih menyeluruh. Hal ini dapat berimplikasi pada tingginya jumlah biaya audit yang dibebankan auditor.

H2: Efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit.

MOTODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan keuangan tahun 2015-2017. Penelitian mulai dilakukan ditahun 2015 dikarenakan tepat pada tahun pemerintahan jokowi. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari informasi yang tersaji

pada *Annual Report*. Sebanyak perusahaan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pada Tabel 1.

Tabel 1
Sampel penelitian

No	Kriteria Sampel	2015	2016	2017
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI	510	525	510
2	Perusahaan Industri Keuangan	(80)	(82)	(87)
3	Laporan keuangan tidak dapat diakses	(95)	(64)	(46)
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan biaya audit	(232)	(230)	(255)
	Total	103	149	192
	Total Observasi	444		

Definisi operasional variabel

Variabel dependen penelitian adalah biaya audit yang didefinisikan sebagai jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai jasa auditor eksternal yang telah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Biaya audit diukur dengan logaritma natural biaya audit yang terdapat dalam laporan keuangan.

Variabel independen penelitian adalah koneksi politik dan efektivitas komite audit. Koneksi politik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana salah satu pemimpin perusahaan yakni dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas (memiliki saham minimal 10%) merupakan anggota legislatif, menteri, petinggi partai politik atau orang yang berkaitan dengan pemerintah. Koneksi politik (POL) dalam penelitian ini diukur dengan variable *dummy*, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Variabel independen yang kedua adalah efektivitas komite audit yang di definisikan sebagai komite yang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan dari pemegang saham untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan andal, pengendalian internal, dan risiko manajemen, melalui upaya melaksanakan pengawasan dengan tekun. Efektivitas komite audit diukur dengan indeks komposit (EFFAC5) dikonfirmasi ketika kelima karakteristik. Lima karakteristik gabungan adalah sebagai berikut: independensi komite audit (IAC), keahlian komite audit (ACEXP), ketekunan komite audit (ACD), ukuran komite audit (SAC) dan ketua komite audit dengan keahlian akuntansi (ACCHX). Sistem skor digunakan dimana nilai dikotomis dari "1" atau "0" untuk setiap karakteristik komite audit yang efektif (Ali dkk., 2018), setelah nilai dari skor efektivitas didapat dirasioikan dengan skor efektivitas komite audit dalam perusahaan dibagi nilai skor sempurna.

Variabel Kontrol penelitian adalah kantor akuntan publik, *return on asset* (ROA), dan ukuran perusahaan. Kantor akuntan publik diukur dengan variabel *dummy*. Kode 1 diberikan pada perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik big 4 dan kode 0 diberikan pada perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik non big 4. ROA diukur menggunakan pendapatan operasional setelah pajak dibagi total asset. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total asset.

Adapun teknik analisis yang digunakan meliputi analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (Ghozali, 2011). Analisis statistika deskriptif berisi informasi mengenai karakteristik data penelitian berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata dan standar deviasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut model persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$LAudFee_{it} = \alpha_0 + \beta_1 POL_{it} + \beta_2 EFFAC_{it} + \beta_3 BIG4_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

AudFee	= <i>Audit Fee</i> yang dikeluarkan oleh entitas go-publik
α_0	= Konstanta
POL	= koneksi politik dalam perusahaan
EFFAC	= efektivitas komite audit
BIG4	= Auditor big4. Menggunakan <i>dummy</i> , 1 di audit oleh Big4 dan 0 untuk di audit selain Big4
ROA	= <i>Return of asset</i>
SIZE	= Ukuran perusahaan
ϵ_{it}	= Koefisien error

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di bawah ini, dapat diketahui bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu biaya audit memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 775 juta, ini berarti bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia pada 2015 sampai 2017 membayar jumlah biaya audit sebesar Rp 775 juta kepada auditor. Rentang ini cukup tinggi pada variabel ini, dilihat dari perbedaan antara nilai maksimum dan minimum, menggambarkan bahwa sampel perusahaan dalam penelitian ini mewakili jumlah nominal biaya audit dari kecil ke besar.

Selain itu, tabel statistik deskriptif di bawah ini juga diketahui bahwa ada 307 perusahaan yang memiliki koneksi politik atau sekitar 69,1% dari total sampel. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faccio. (2006) bahwa ada lebih dari 28% perusahaan di Indonesia yang terhubung secara politis.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah efektivitas Komite Audit yang diukur dengan lima karakteristik digunakan dalam penelitian Ali dkk. (2018) kemudian dilakukan pembagian skor efektivitas setiap perusahaan dibagi nilai sempurna. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 0,8059. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata sampel dalam perusahaan memiliki nilai efektivitas komite audit cukup baik. Nilai rata-rata pada penelitian Ali dkk. (2018) sebesar 4 jika dirasioikan menjadi 0,8 diperoleh dari skor 4 pada lima karakteristik efektivitas komite audit.

Tabel 2
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fee	444	17.66	28.4696	20.4696	1.15451
Komite	444	.40	1.00	.8059	.14178
Roa	444	-.46	1.85	.0475	.13989

aset		444	19.30	31.88	28.7188	1.74163
Valid N (listwise)		444				
Variabel Dummy						
Variabel		%Score1		%Score0		total%
Politik		(307) 69,1%		(137) 30,9%		(444) 100%
kap		(246) 35,4%		(198) 44,6%		(444) 100%

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini di Uji dengan uji regresi linier berganda. Sebelum di lakukan uji regresi linier berganda peneliti melakukan uji asumsi klasik yakni uji normalitas data, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui data penelitian yang sudah terdistribusi normal dan data bebas dari heterokedastisitas dan multikolinearitas. Model penelitian ini sudah layak dilakukan uji regresi linear berganda karena sudah lolos dari uji asumsi klasik.

nilai *adjusted R2* pada Tabel 3 memiliki nilai sebesar 0.384 yang artinya variasi variabel koneksi politik dan efektivitas komite audit mampu menjelaskan variabel dependen yaitu biaya audit sebesar 38.4% sementara 61.6% sisanya dipengaruhi oleh factor lain diluar model penelitian yang tidak dipilih sebagai variabel depende. Selanjutnya uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mengindikasikan bahwa pengujian secara simultan atau bersama-sama variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Uji Statistik

Variabel	Coefficients	t-statistic	sig
Constant	13.869	17.355	.000
politik	.324	.130	.001
Komite	-.597	-1.965	.050
kap	.776	8.321	.000
roa	.700	2.262	.024
aset	.226	8.336	.000
Uji F		.000	
Adjusted R ²		.384	
N		444	

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Audit

Hasil penelitian yang dilakukan pada model penelitian ini menunjukkan bahwa hasilnya konsisten dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit. Tingkat signifikansi sebesar 5% ($0.001 < 0.05$), sehingga H_1 diterima. Penjelasan hasil dalam penelitian ini adalah adanya hubungan politik dalam perusahaan diyakini dapat meningkatkan resiko bawaan (*inherent risk*) dari perusahaan (Gul, 2006). Perusahaan yang terkoneksi secara politik dapat membantu urusan

yang berhubungan dengan pemerintahan (Faccio, 2006), dan perusahaan yang terkoneksi bisa melobby kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaannya.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menutupi proses sumbangan politi yang akan mengakhibatkan transparansi yang rendah pada laporan keungan. Transparansi rendah dapat berakibat pada buruknya kualitas laporan keungan dan terjadi risiko salah saji pada laporan keungan (Chaney dkk., 2011; Srinidh dkk., 2011; Walker dan Reid, 2002; Yu dan Yu, 2011). Semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi juga upaya yang dilakukan auditor dalam memeriksa perusahaan yang terkoneksi secara politik. Auditor diharapkan dapat memberikan opini yang tepat pada laporan keungan dengan imbalan biaya audit yang lebih tinggi dari perusahaan yang terkoneksi (Ariningrum dan Diyanty, 2017; Gul, 2006; Khan dkk., 2016; Tee, 2018; Wahab dkk., 2011; Wahab dkk., 2009).

Hasil ini juga selaras dengan perspektif *Audit Pricing Theory* yang menyatakan bahwa auditor menentukan biaya audit yang akan dibebankan harus mempertimbngkan resiko yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat tercermin dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan prosedur audit. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki resiko inheren yang tinggi (Gul, 2006) sesuai dengan teori dan hasil empiris bahwa perusahaan yang terkoneksi politik membayar biaya audit lebih tinggi dari perusahaan yang tidak terkoneksi.

Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Biaya Audit

Hasil penelitian yang dilakukan untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hipotesis kedua menyatakan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap biaya audit. Tingkat signifikansi sebesar 5% ($0.050 < 0.05$), sehingga H_1 diterima. Penjelasan hasil dalam penelitian ini yakni dalam prakteknya biaya audit tidak hanya dilihat dari perspektif auditor sebagai penyedia jasa audit tapi juga klien berperan dalam penentuan biaya audit yang harus dibayarkan Hey dkk., (2006). Permintaan klien dalam penentuan biaya audit yang dibayarkan dikarenakan klien menginginkan audit yang dilakukan oleh auditor lebih berkualitas, hal tersebut menyebabkan biaya audit yang dikenakan akan semakin tinggi.

Perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik. Perusahaan melakukannya untuk mempertahankan reputasi dan melindungi diri sendiri dari tanggung jawab hokum yang mungkin akan terjadi dimasa depan dikarenakan rendahnya tingkat pengawasan yang dikalkukan oleh perusahaan (Carcello, Hermanson, Neal, & Riley, 2002). Permintaan untuk kualitas audityang lebih baik dan cakupan audit yang lebih luas maka perusahaan akan membayar audit yang lebih tinggi.

Hasil penelitian mendukung argumen teori sisi permintaan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi manajemen. Semakin tinggi permintaan untuk kualitas audit yang lebih baik. Permintaan untuk kualitas audit yang tinggi pada gilirannya akan mempengaruhi biaya audit yang lebih tinggi yang dibebankan oleh auditor (Carcello, Hermanson, Neal, & Riley, 2002).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan efektivitas komite audit terhadap biaya audit. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ditemukan

bahwa adanya koneksi politik dalam perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. Perusahaan yang terkoneksi politik dianggap memiliki risiko lebih tinggi daripada perusahaan lain yang tidak memiliki koneksi politik dan akibatnya auditor akan meningkatkan upaya audit yang diperlukan dan implikasinya terhadap biaya audit yang tinggi yang dibebankan (Ariningrum dan Diyanty, 2017; Gul, 2006; Khan dkk., 2016; Tee, 2018; Wahab dkk., 2011; Wahab dkk., 2009). Pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. Hasil ini mendukung argument dari sisi permintaan yang menyaratkan bahwa komite audit yang efektif akan melakukan pengawasan. Komite audit akan meminta auditor melakukan audit dengan kualitas yang baik dan lebih menyeluruh yang akan berimplikasi pada tingginya biaya audit yang dibebankan (Carcello, Hermanson, Neal, & Riley, 2002).

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang pertama masih sedikitnya perusahaan yang mengungkapkan biaya audit dalam laporan tahunannya, yang kedua di Indonesia masih belum ada sumber terpercaya yang menunjukkan hubungan seseorang dengan politisi jadi kami hanya menggunakan media online sebagai informasi untuk mengetahui hubungan politik seseorang. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambah variabel yang memiliki pengaruh terhadap biaya audit dan untuk peneliti berikutnya untuk mencari sumber yang lebih akurat untuk hubungan seseorang dengan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics. *Auditing: A journal of practice & theory*, 19(2), 47-66.
- Ali, M. J., Singh, R. K. S., & Al-Akra, M. (2018). The impact of audit committee effectiveness on audit fees and non-audit service fees: Evidence from Australia. *Accounting Research Journal*, 31(2), 174-191.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, m. S. (2014). *Auditing and assurance services* (15 edition ed.): pearson education.
- Ariningrum, I., & Diyanty, V. (2017). The Impact of Political Connections and the Effectiveness of Board of Commissioner and Audit Committees on Audit Fees. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 53-70.
- Arnold, V., Bedard, J. C., Phillips, J. R., & Sutton, S. G. (2012). The impact of tagging qualitative financial information on investor decision making: implications for XBRL. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 2-20.
- Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2004). Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors' planning and pricing decisions. *The Accounting Review*, 79(2), 277-304.
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley Jr, R. A. (2002). Board characteristics and audit fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365-384.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of accounting and Economics*, 51(1-2), 58-76.

- Chen, E. T., & Nowland, J. (2010). Optimal board monitoring in family-owned companies: Evidence from Asia. *Corporate Governance: An International Review*, 18(1), 3-17.
- Craswell, A. T., Francis, J. R., & Taylor, S. L. (1995). Auditor brand name reputations and industry specializations. *Journal of accounting and Economics*, 20(3), 297-322.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American economic review*, 96(1), 369-386.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Fernandez, A. (2018) *Para pengusaha di balik partai politik/Interviewer: T. Hadiyantono*. KONTAN.co.id, jakarta.
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *The American Economic Review*, 91(4), 1095-1102.
- Francis, J. R., & Wilson, E. R. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and auditor differentiation. *Accounting Review*, 663-682.
- García-Ramos, R., & García-Olalla, M. (2014). Board independence and firm performance in Southern Europe: A contextual and contingency approach. *Journal of Management & Organization*, 20(3), 313-332.
- Ghosh, A. A., & Tang, C. Y. (2015). Assessing financial reporting quality of family firms: The auditors' perspective. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 95-116.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*: Semarang: Universitas Diponegoro.
- Goodwin-Stewart, J., & Kent, P. (2006). Relation between external audit fees, audit committee characteristics and internal audit. *Accounting & Finance*, 46(3), 387-404.
- Gul, F. A. (2006). Auditors' response to political connections and cronyism in Malaysia. *Journal of Accounting Research*, 44(5), 931-963.
- Huang, C.-J. (2010). Board, ownership and performance of banks with a dual board system: Evidence from Taiwan. *Journal of Management & Organization*, 16(2), 219-234.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Johnson, S., & Mitton, T. (2003). Cronyism and capital controls: evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*, 67(2), 351-382.

- Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. *Journal of Accounting Research*, 43(3), 453-486.
- Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 357-374. doi:10.1108/ijaim-05-2016-0061
- Knechel, W. R., & Willekens, M. (2006). The role of risk management and governance in determining audit demand. *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(9-10), 1344-1367.
- Kroszner, R. S., & Stratmann, T. (1998). Interest-group competition and the organization of congress: theory and evidence from financial services' political action committees. *American economic review*, 1163-1187.
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L.-A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. *Journal of development economics*, 87(2), 283-299.
- Lin, J. W., Li, J. F., & Yang, J. S. (2006). The effect of audit committee performance on earnings quality. *Managerial Auditing Journal*, 21(9), 921-933.
- Muniandy, B., & Ali, M. J. (2012). OWNERSHIP CONCENTRATION, POLITICAL CONNECTION AND AUDIT FEES: SOME EVIDENCE FROM MALAYSIAN CAPITAL MARKET. *CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL*, 400.
- Musah, A. (2017). Determinants of audit fees in a developing economy: evidence from Ghana. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(11), 716-730.
- Ramsay, I., Stapledon, G., & Vernon, J. (2001). Political donations by Australian companies. *Federal Law Review*, 29(2), 179-221.
- Rittenberg, L. E., & Nair, R. D. (1993). *Improving the effectiveness of audit committees*: Institute of Management Accountants.
- Safari, M. (2017). Board and audit committee effectiveness in the post-ASX Corporate Governance Principles and Recommendations era. *Managerial Finance*, 43(10), 1137-1151.
- Salehi, M., & Shirazi, M. (2016). Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure: Evidence from the Tehran Stock Exchange. *Management Research Review*, 39(12), 1639-1662.
- Septyaningsih, I. (2017). OJK: Pasar Modal Indonesia Berkembang Sangat Pesat. *republika*.
- Setyawan, F. A. (2017). Ombudsman: 222 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan. *cnn indonesia*.
- Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. *Journal of accounting research*, 161-190.

- Srinidh, B., Zhang, H., & Zhang, T. (2011). Transparency in politically connected firms: Evidence from private sector firms in China *City University of Hong Kong Working Paper*.
- Sulistiyanto, S. (2008). *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*: Grasindo.
- Tee, C. M. (2018). Family firms, political connections and audit fees: evidence from Malaysian firms. *Managerial Auditing Journal*, 33(6/7), 613-632.
- Vafeas, N. (2005). Audit committees, boards, and the quality of reported earnings. *Contemporary Accounting Research*, 22(4), 1093-1122.
- Vafeas, N., & Waagelein, J. F. (2007). The association between audit committees, compensation incentives, and corporate audit fees. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 28(3), 241-255.
- Veronica, S., & Bachtiar, Y. S. (2005). Corporate governance, information asymmetry, and earnings management. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 77-106.
- Wahab, E. A. A., Zain, M. M., & James, J. (2011). Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 393-418.
- Wahab, E. A. A., Zain, M. M., James, K., & haron, H. (2009). Institutional investors, political connection and audit quality in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 22(2), 167-195.
- Walker, G. R., & Reid, T. (2002). Upgrading corporate governance in East Asia: Part 1.
- Wu, X., & Li, H. (2015). Board independence and the quality of board monitoring: Evidence from China. *International Journal of Managerial Finance*, 11(3), 308-328.
- Yu, F., & Yu, X. (2011). Corporate lobbying and fraud detection. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(6), 1865-1891.
- Zaman, M., Hudaib, M., & Haniffa, R. (2011). Corporate governance quality, audit fees and non-audit services fees. *Journal of Business Finance & Accounting*, 38(1-2), 165-197.

PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP BIAYA AUDIT

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%